Upaya Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Positif

Suryati¹; Teguh Anindito²; Wiwin Muchtar Wiyono³; Nurlaeli Sukesti Ariani Nasution⁴

^{1 2 3 4} Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia.

Abstract

The issue to be discussed is environmental protection efforts as part of the protection of human rights in Indonesian positive law. This writing uses normative research methods. The results of the analysis show that there are several government programs to protect the environment in Indonesia, for example, the National Action Plan for Human Rights, and the planting of a million trees. Legal instruments on environmental protection as part of the protection of Human Rights, which are based on national law as contained in the 1945 Constitution, Law No. 32/2009, and Law No. 39/1999. Then based on international law, it is stated in Principle 1 of the Declaration. Stockholm 1972, and its Preamble. However, there is still a lot of damage or environmental problems caused by humans. Realizing how important the environment is as part of human rights, the community should be more concerned about protecting and respecting the environment for the sake of survival. In order to minimize environmental problems, in addition to the existing regulations, stricter supervision and enforcement are also needed. Environmental protection in Indonesia needs to be further improved so that the continuity of life is more guaranteed, because the right to a good environment is the right of every human being.

Keyword : Protection Efforts, Environment, Human Rights, Positive Law

Masalah yang akan dibahas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada beberapa program pemerintah untuk menjaga lingkungan di Indonesia, misalnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan penanaman sejuta pohon. Perangkat hukum perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia, yang didasarkan pada hukum nasional sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, UU No. 32/2009, dan UU No. 39/1999. Kemudian berdasarkan hukum internasional, dinyatakan dalam Prinsip 1 Deklarasi. Stockholm 1972, dan Pembukaannya. Namun, masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Menyadari betapa pentingnya lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia, masyarakat harus lebih peduli untuk melindungi dan menghormati lingkungan demi kelangsungan hidup. Untuk meminimalisir permasalahan lingkungan, selain regulasi yang ada, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat juga diperlukan. Perlindungan lingkungan di Indonesia perlu lebih ditingkatkan lagi agar kelangsungan hidup lebih terjamin, karena hak atas lingkungan hidup yang baik adalah hak setiap manusia.

Kata Kunci : Upaya Perlindungan, Lingkungan Hidup, Hak Asasi Manusia, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hukum lingkungan berkembang pesat, tidak hanya dalam kaitannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (social control) dengan peran "agent of stability", tetapi lebih penting lagi sebagai sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran "agen stabilitas". pembangunan" atau "agen Perubahan.^[1] Timbulnya kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup bagi manusia harus dilandasi oleh kesadaran akan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai negara yang mengakui universalitas HAM^[2], mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya yaitu pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pekerjaan, keamanan, sandang, lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun pada kenyataannya kualitas hidup masyarakat justru mengalami penurunan. Hak dasar untuk hidup telah terancam oleh perusakan lingkungan, penggundulan hutan, pencemaran air dan udara, dan perampasan penghidupan masyarakat (agraria dan sumber daya alam).

Lingkungan merupakan salah satu bidang yang paling dominan dalam hubungan internasional, karena berkaitan erat dengan kehidupan di planet ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia itu sendiri karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang Hak Asasi Manusia dan ditambah dengan kurangnya pengawasan dan perhatian dari dunia internasional dan nasional. Di dunia internasional, hak asasi manusia ditandai dengan Magna Charta 1215 di Inggris dan deklarasi hak asasi manusia dunia pada tanggal 10 Desember 1948, sedangkan di Indonesia juga termasuk Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.32/2009 mengatur tentang hak masyarakat atas lingkungan atau pengelolaan lingkungan.^[3]

Menyadari bahwa kerusakan lingkungan akan terus berlangsung tanpa terkendali jika tidak ada norma yang membatasi aktivitas yang dilakukan manusia dalam mengejar kepentingannya, sejumlah rekomendasi telah dikemukakan oleh World Agencies, sebagai pedoman bagi negara-negara untuk melakukan aktivitasnya yang telah berdampak pada lingkungan.^[4]

Hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat sirkular. Kegiatan yang hanya bermanfaat atau membendung sungai sedikit atau banyak akan mengubah lingkungan. Perubahan lingkungan yang pada gilirannya akan mempengaruhi manusia. Kegiatan manusia harus memperhatikan kualitas lingkungan, karena merupakan dasar dan pedoman untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan. Kualitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan mengurangi risiko lingkungan. Upaya untuk mengurangi risiko lingkungan akan meningkatkan risiko lain yang ada atau menciptakan risiko baru. Kualitas lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan kualitas hidup, semakin tinggi derajat kualitas hidup di lingkungan tertentu, semakin tinggi derajat kualitas lingkungan, karena kualitas hidup tergantung pada pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas lingkungan. dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Semakin tinggi derajat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, maka semakin tinggi pula kualitas lingkungan dan sebaliknya.^[5] Artikel ini membahas: upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada.^[6] Spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang diperlukan adalah data sekunder sebagai data utama yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti dengan UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah saatnya kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini untuk diantisipasi dan ditangani dengan langkah dan upaya yang tepat agar lingkungan tetap terjaga dan terlindungi di masa yang akan datang. Mengingat kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari perbuatan kebiasaan manusia, sehingga tanggung jawab yang tepat perlu ditanamkan pada setiap masyarakat.^[7] Jika tidak, penurunan kualitas lingkungan, air, udara dan kerusakan alam lainnya akan menjadi bumerang dan akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Mau tidak mau, masyarakatlah yang pada akhirnya akan menjadi korban.

Konsep kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur secara komprehensif yang meliputi pemantauan sendiri dengan melaporkan hasilnya kepada instansi terkait, dan terbuka untuk umum; pengawasan primer oleh pemeriksa dari instansi perijinan; pengawasan kedua dari instansi pemerintah provinsi atau (pusat) jika instansi pertama gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Pengawasan lainnya adalah pengawasan eksternal atau pengawasan publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pembangunan berkelanjutan, diperlukan konsep pengawasan publik yang terbuka dan luas, terutama penerapan mekanisme keberatan jika prosedur perizinan dan masukan publik diabaikan oleh instansi pemberi izin. Tentunya agar lebih efektif Pengawasan memerlukan strategi pemidanaan yang tepat, mulai dari penerapan sanksi yang paling ringan (peringatan satu, dua, dan tiga) hingga pencabutan izin. Strategi pemberian sanksi ini diperlukan untuk menghindari pengenaan sanksi berdasarkan kesewenang-wenangan.^[8]

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggung jawab kesejahteraan rakyatnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam upaya memikirkan dan mewujudkan terbentuknya pelestarian lingkungan. Upaya tersebut antara lain:^[9]

1. Mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang mengatur tentang Tata Guna Lahan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No.51/1993
3. Pada tahun 1991, pemerintah membentuk Badan Pengendalian Lingkungan dengan tujuan utama:
 - a. Menangani kasus polusi
 - b. Mengawasi bahan berbahaya dan beracun
 - c. Melakukan analisis dampak lingkungan
4. Pemerintah merencanakan gerakan menanam sejuta pohon.

5. Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai sekretariat yang dipimpin oleh seorang Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan aksi HAM, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan sebagai negara yang dikenal sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia, dengan ekosistem yang beragam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau indah dan sumber daya alam yang kaya, kita harus terus menghadapi tantangan dari fenomena alam.^[10] Meningkatnya tekanan untuk memenuhi tuntutan penduduk dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara.

Sementara itu, kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menimbulkan beberapa pertanyaan seperti: apa yang ingin dicapai, bagaimana kelanjutannya, dengan cara apa pengelolaan lingkungan dilaksanakan. Berdasarkan pertanyaan tersebut memacu kesadaran lingkungan di Indonesia yang tidak lepas dari pengaruh kesadaran hukum lingkungan global.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hyronimus Rhiti berpendapat bahwa good governance yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan juga berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip umum good governance. Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan lingkungan hidup meliputi asas kepastian hukum, asas kepastian hukum, dan asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang dimunculkan, dan prinsip penyelenggaraan kepentingan umum. Keterkaitan antara good governance dan isu pengelolaan lingkungan juga dikemukakan oleh Mas Achmad Santosa yang mencontohkan berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru, yang menurut Achmad Santosa disebabkan oleh pemerintah yang tidak memiliki good governance.^[11]

Ketiadaan kemauan politik pemerintah bukan satu-satunya faktor penghambat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan. Menurut Mas Achmad Santosa, selain kurangnya kemauan politik yang kuat dari pemerintah, lemahnya para aktivis lingkungan di birokrasi dan perguruan tinggi yang mengaitkan good governance sebagai prasyarat dasar pengelolaan lingkungan yang efektif dengan isu-isu lingkungan yang diadvokasi juga menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemahaman yang benar tentang good governance, khususnya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, tidak hanya ditekankan pada kemauan politik pemerintah saja, tetapi diharapkan dari seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Santosa, kurangnya pemahaman tentang hubungan Good governance dengan isu perlindungan lingkungan juga menyebabkan persepsi di kalangan aktivis hak asasi manusia (pegiat hak sipil dan politik bahwa aktivis lingkungan adalah aktivis yang berperilaku elitis dan tidak mampu mendorong iklim demokrasi Terciptanya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup yang baik efektif karena pengelolaan lingkungan yang efektif tergantung pada berfungsinya sistem politik yang menjamin demokrasi dan supremasi hukum.^[12]

KESIMPULAN

Upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif hukum positif Indonesia, antara lain lahirnya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (M) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 yang dijadikan acuan dalam menjalankan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Selain pembentukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, pemerintah juga menetapkan peraturan tentang perlindungan lingkungan yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang mengatur tentang Tata Guna Lahan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta kegiatan penanaman sejuta pohon. Instrumen perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang didasarkan pada Hukum Nasional Indonesia yang termuat dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia. Hukum internasional juga mengaturnya sebagaimana tercantum dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972 dan Pembukaannya. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas, pada kenyataannya masih banyak kerusakan atau masalah lingkungan yang diakibatkan oleh manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arifin Siregar, M. Sanwani Nasution, Syamsul Arifin, Abdul Rahman, Hasnil Basri Siregar, *Hukum Lingkungan Internasional (Kumpulan Materi Penataran)*, Medan:Penerbit USU Press, 1997:41
- [2] Agung Wardana, *Perusakan Lingkungan Sebagai Pelanggaran HAM*, artikel, 2007,Bali, tt.
- [3] I Dewa Made Nhara Prana Pradnyana, I Dewa Gede Admadja, 2013, "Pentingnya KreasiHakim Dalam Mengoptimalkan Upaya Perdamaian Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok", Vol. 01, No. 15, Desember, 2013: 2, OJS Kertha Semaya, diakses dalam: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6274/4766>
- [4] Koesnadi Hardjosoemantri, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Gajahmada University Presss, 2006:4
- [5] Morais Barakati, *Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan*, *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 8/Sep/2015,hlm. 95.
- [6] Mas Ahmad Sentosa, *Good Government Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 2001:127
- [7] Nopyandri, *Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III September 2014
- [8] Riki, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan di Kawasan Pertambangan Morowali Ditinjau dari Hukum Lingkungan*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013, hlm.6
- [9] <http://jokowarino.id/upaya-pelestarian-lingkungan-hidup>
- [10] <http://wawan-anker15.blogspot.co.id/p/upaya-yang-dilakukan-pemerintah.html?m=1>
- [11] <http://dandyhernadypahusa.blogspot.co.id/2013/09/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-10.html?m=1>